

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara: Indonesia dalam Dinamika Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Edisi V. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2016.
- Fajar, Mukti. dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Fitzgerald, John. *The Nature of Law: An Introduction to Legal Philosophy*. New York: Oxford University Press, 2012.
- Flambonita, Suci. *Hukum Ketenagakerjaan: Telaah Keberlakuan Undang-Undang Ketenagakerjaan bagi Home Based Workers di Indonesia Perspektif Upah yang Layak*. Palembang: Media Nusa Creative, 2020.
- Garner, Bryan. A (Ed.). *Black's Law Dictionary (11th ed.)*. St. Paul, MN: Thomson Reuters, 2019.
- Hakim, Abdul. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003*, Cetakan Kelima. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020.
- Harahap, Arifuddin Muda. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*. Malang: Literasi Nusantara, 2020.
- Hermawan, Ari. *Penyelesaian Sengkata Hubungan Industrial*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2019.
- Husni, Lalu. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Edisi Revisi*, Cetakan ke-12. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada, 2010.
- Noval, Sayid Mohammad Rifqi. *Hukum Ketenagakerjaan: Hakikat Cita Keadilan Dalam Sistem Ketenagakerjaan*. Bandung: Refika Aditama, 2017.

Sipayung, Parlin Dony, et al. *Hukum Ketenagakerjaan*. Medan: Yayasan Kita Menulis, 2022.

Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Baru. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

Soepomo, Iman. *Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja*, Cetakan VI. Jakarta: Djambatan, 2016.

B. Jurnal

Agustini, Shenti. "Kedudukan Hukum Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang Bertentangan Dengan Hukum". *Jurnal Komunitas Yustisia*. Volume 4 Nomor 3 Tahun 2021.

Erlangga, Rosa Ferdian. " Mutasi Terhadap Kinerja Karyawan pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi Jakarta". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Volume 1 Nomor 1 Tahun 2017.

Fatimah, Yani Nur. "Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Pengadilan Hubungan Industrial dalam Pemenuhan Hak Pekerja/Buruh Yang di Putus Hubungan Kerja". *Pandecta Research Law Journal*. Volume 10 Nomor 2 Tahun 2015.

Hidayat. Ihsan Dzuhur, et al. "Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Tenaga Kerja Indonesia oleh Pemerintah Daerah". *Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 10 Nomor 1 Tahun 2021.

Juaningsih, Imas Novita. "Analisis Kebijakan PHK Bagi Para Pekerja Pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia". *Adalah: Buletin Hukum & Keadilan*. Volume 4 Nomor 1 Tahun 2020.

Jahari, Akis. dan Rachmatin Artita, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Akibat Pemutusan Hubungan Kerja Tanpa Pesangon Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja", *Case Law : Journal of Law*, Volume 4 Nomor 2 Tahun 2023.

- Razzak, Muhammad Dheyu. et al. "Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Disebabkan Menolak Mutasi". *Perfecto: Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 1 Nomor 2 Tahun 2023.
- Sabmoko, Hubertus Panji Dwi. dan Gunardi, "Mutasi Kerja Dalam Satu Grup Perusahaan. Studi Kasus (Putusan Pengadilan Negri Nomor 144/Pdt.Sus-PHI/2019/Pn.Plg dan Putusan Mahkamah Agung No 1283k/Pdt.SusPhi/2020)". *Jurnal Hukum Adigama*. Volume 4 Nomor 2 Tahun 2021.
- Sherly, Sherly Ayuna Putri. et al. "Pembaharuan Penyelesaian Perselisihan Ketenagakerjaan di Pengadilan Hubungan Industrial Berdasarkan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Murah Sebagai Upaya Perwujudan Kepastian Hukum". *Jurnal Bina Mulia Hukum*. Volume 5 Nomor 2 Tahun 2021, 310-27. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v5i2.307>.
- Sinaga, Niru Anita. dan Tiberius Zaluchu. "Perlindungan Hukum Hak-Hak Pekerja dalam Hubungan Ketenagakerjaan di Indonesia". *Jurnal Teknologi Industri*. Volume 6 Tahun 2021.
- Sudjudiman, Narendra Haikal. dan Ulfatun Najicha. "Pengaturan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Indonesia dan Singapura (Studi Perbandingan Hukum Indonesia dan Hukum Singapura)". *UIR LAW REVIEW*. Volume 4 Nomor 2 Tahun 2020.
- Surya, Deden Muhamad. "Pemutusan Hubungan Kerja Akibat Menolak Mutasi Ditinjau Dari Perspektif Asas Kepastian Hukum dan Asas Keadilan". *Jurnal Wawasan Yuridika*. Volume 2 Nomor 2 Tahun 2018.
- Wibowo, Satria Hadi. dan Ariawan Gunadi, "Analisis Hukum PHK Sepihak Terhadap Pekerja Keamanan dengan Perjanjian Lisan Berdasarkan Hukum Indonesia". *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*. Volume 6 Nomor 4 Tahun 2024.
- Wibowo, Satria Hadi. dan Juan Matheus. "Tinjauan Yuridis Pemberian Uang Pesangon Kepada Karyawan yang Di-PHK Pasca Pengesahan Perppu Cipta Kerja". *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Volume 10 Nomor 5 Tahun 2023.

C. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Nomor 39 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara 4279).*

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356).*

Indonesia. *Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.100/Men/VI/2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Tertentu, Pasal 1 huruf a.*

D. Karya Ilmiah

Kesuma, Muhammad Emil. “Analisis Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak”. *Skripsi*. Palembang: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2020.

E. Internet

Renita. “Pengertian Hubungan kerja Adalah : Jenis - Jenis, Perjanjian Kerja dan Unsur-unsur yang Ada dalam Suatu Perjanjian Kerja”. *Referensisiswa.my.id*. 25 Februari 2024. <https://www.referensisiswa.my.id/2021/04/pengertian-hubungan-kerja-adalah-jenis.html>. Diakses pada 15 Oktober 2024.

Sanjaya, Yeftha Christopherus Asia. “10 Hal yang Tidak Bisa Jadi Alasan Perusahaan PHK Karyawannya”. *Kompas.com*. 6 Januari 2023. <https://www.kompas.com/tren/read/2023/01/06/150000165/10-hal-yang-tidak-bisa-jadi-alasan-perusahaan-phk-karyawannya?page=all#:~:text=Ada%20larangan%20lain%20bagi%20pengusaha,gugur%20kandungan%2C%20atau%20menyusui%20bayinya>. Diakses tanggal 1 November 2024.

Wahyuni, Willa. "Aturan dan Syarat Mendapatkan Pesangon bagi Karyawan yang Di-PHK". *Hukumonline*. 17 November 2022. <https://www.hukumonline.com/berita/a/aturan-dan-syarat-mendapatkan-pesangon-bagi-karyawan-yang-di-phk-lt637644d2d5c4d/?page=2>. Diakses pada tanggal 5 Oktober 2024.